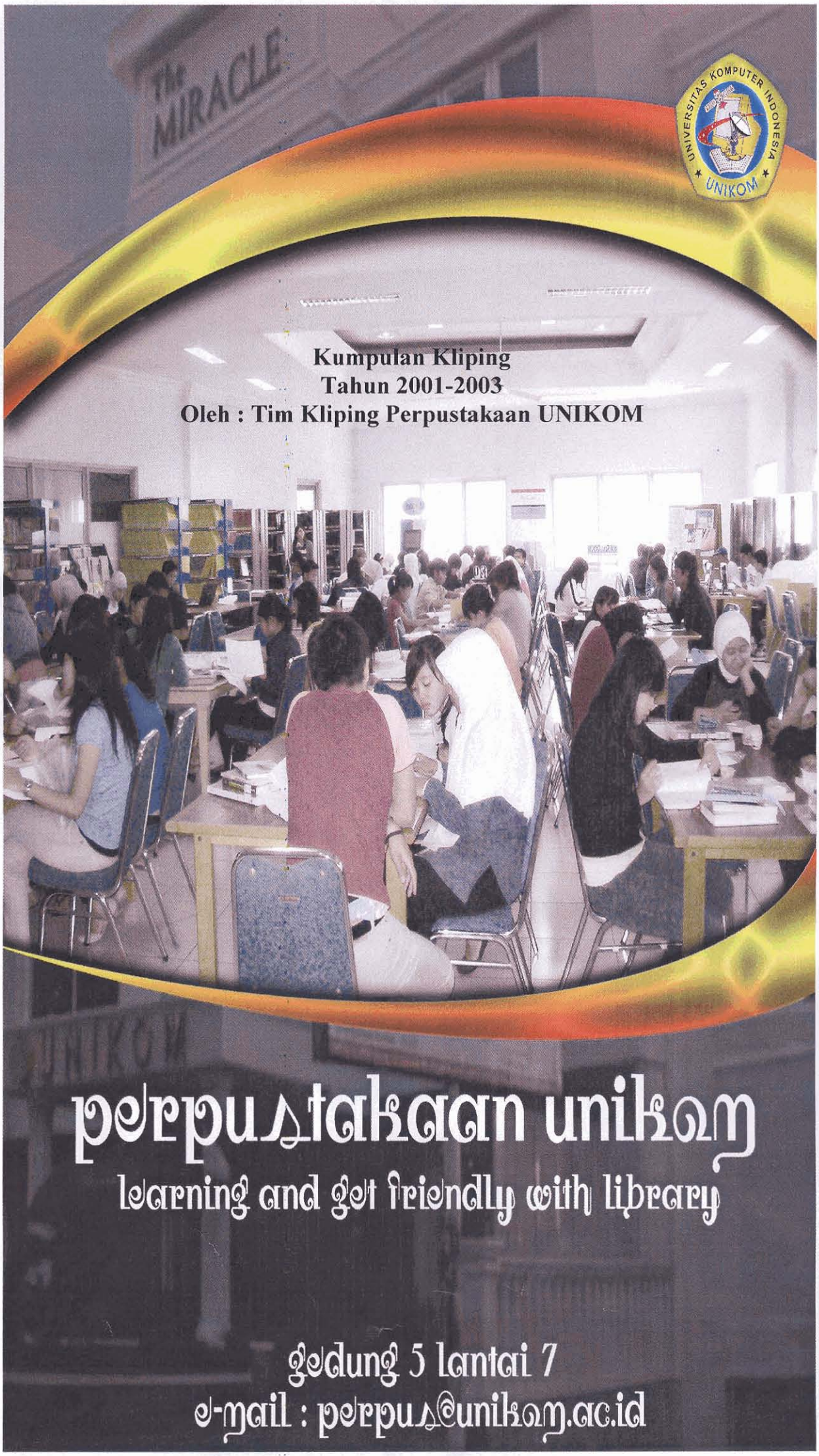


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hari /Bulan/ Tahun : RABU / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 6 / 3-7
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : -
Judul Artikel/ Berita : ANGGOTA DPR Usul RUU Kepresidenan: Untuk Memangkas Sumber Kekuasaan ...
SUB DEL T NO KLASS : PRESIDEN, JABATAN / 351

Anggota DPR Usul RUU Kepresidenan

Untuk Memangkas Sumber Kekuasaan Baru Presiden

Jakarta, Kompas

Sebanyak 33 anggota Dewan mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Kepresidenan sebagai usul inisiatif DPR. Tidak adanya aturan tersendiri dalam bentuk undang-undang terhadap lembaga kepresidenan, membuat kekuasaan Presiden menjadi besar dengan ruang gerak yang luas, baik dalam bidang legislatif maupun yudikatif, padahal seharusnya Presiden hanya memegang kekuasaan eksekutif. RUU lembaga Kepresidenan juga dimaksudkan untuk melenyapkan sumber kekuasaan baru Presiden.

RUU usul inisiatif dibacakan seorang pengusul, Prof Dr Moh Asikin, dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin Soetardjo Soerjogoeritno, Selasa (8/5). RUU ini sudah ada di Badan Legislasi DPR sejak awal Februari 2001.

Asikin saat membacakan penjelasan pengusul mengatakan, berbagai sebutan melekat pada jabatan Presiden kenyataannya telah dijadikan sumber kekuasaan baru bagi Presiden, di luar yang disebutkan dalam UUD 1945. Jenis kekuasaan baru antara lain Presiden sebagai mandataris MPR telah berubah menjadi Presiden sebagai pengganti MPR, hak prerogatif Presiden yang tidak disebut dalam UUD 1945 berubah arti menjadi "pihak lain tidak boleh mempengengaruhi" dan Presiden sebagai Panglima Tertinggi ABRI berubah arti menjadi "ABRI sebagai alat Presiden untuk mempertahankan kekuasaannya".

"Selain itu, baik secara kelembagaan maupun pribadi, Presiden menguasai sumber keuangan yang cukup besar sehingga dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya," kata Moh Asikin. Dalam era reformasi ini, lanjut Asikin, berbagai pihak mencoba meninjau kembali berbagai kewenangan lembaga Kepresidenan agar searah dengan iklim demokratis dan membuka ruang seluas mungkin bagi partisipasi berbagai kalangan untuk mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan.

Menurut Asikin, upaya peninjauan kewenangan Presiden dilakukan baik dengan cara pengaturan kembali berbagai kewenangan Presiden sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan, sebagaimana terlihat dari hasil amandemen kedua UUD 1945 maupun dikeluarkannya Tap-Tap MPR yang lebih menempatkan posisi dan kewenangan Presiden secara lebih proporsional dalam ketatanegaraan yang searah proses pembentukan iklim demokratisasi.

Bentuk pembatasan

Asikin menyebut sejumlah bentuk pembatasan yang mungkin dapat dilakukan terhadap kekuasaan eksekutif Presiden. Hal ini diletakkan pada tataran politik bahwa Presiden berbagi kekuasaan dengan DPR dan terhadap daerah otonom. Pertama, setiap tokoh yang diangkat Presiden sebagai pejabat publik mempunyai kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan pertimbangan etis kebangsaan.

Di samping itu, kata Asikin, kewenangan Presiden dalam menjalankan kewenangannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak akan terlepas dari keterlibatan atau pertimbangan lembaga tinggi negara lainnya, terutama melalui partisipasi DPR. "Dengan cara ini kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki dan merupakan peluang terjadinya pertentangan dengan prinsip pembentukan pemerintahan yang baik dapat dihindarkan semaksimal mungkin," katanya.

Kedua, pemerintahan daerah diselenggarakan dengan menjamin otonomi politik seluas-luasnya, adil, demokratik, pluralistik, dan memberdayakan masyarakat daerah. Sehingga, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga tercermin dalam peranan Presiden ketika menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan.

Ketiga, lanjut Asikin, pembatasan, larangan, dan kewajiban Presiden terhadap berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkat kredibilitas dirinya sebagai pejabat tinggi negara. Ketentuan semacam ini akan tampak pada pengaturan secara cukup rinci mengenai penetapan sebuah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), Keputusan Presiden (Keppres), keterlibatan dalam aktivitas informal di luar lembaga kepresidenan, dan kemungkinan penerimaan hadiah.

"Berbagai pengaturan ini tentu saja tanpa harus mengabaikan hak-hak yang dimilikinya sebagai seorang yang menjabat sebagai Presiden/Wakil Presiden atau justru menimbulkan hambatan bagi kinerja pemerintahan," katanya.

Usul inisiatif RUU Lembaga Kepresidenan ini dikritik oleh anggota PAH I BP MPR Baharuddin Aritonang dan anggota Dewan Seto G Hariyanto. Menurut mereka, usul ini seharusnya menunggu pembahasan di PAH I BP MPR yang mengamandemen UUD 1945. "DPR mau membahas RUU Lembaga Kepresidenan, sedangkan payungnya saja masih kita bahas," kata Aritonang. **(pep)**

Tanggal : 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16

Hari /Bulan/ Tahun : ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Judul Artikel/ Berita : .....
.....

PASAL-PASAL PENTING

RUU Lembaga Kepresidenan

- Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dan Wakil Presiden dilarang menerima secara langsung atau tidak langsung hadiah dalam bentuk apa pun yang nilainya melebih Rp 25 juta dari pihak lain dan atau pihak tertentu dari negara lain.
- Presiden dan Wakil Presiden dilarang melakukan kegiatan bisnis secara langsung atau tidak langsung, serta dilarang memberikan kemudahan peluang bisnis kepada pihak lain, keluarga, kroni, atau kelompok politiknya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Presiden dan Wapres dilarang aktif dalam kepengurusan badan-badan sosial.
- Presiden dan Wapres dilarang menerima uang dan atau jasa dari pihak lain yang patut diduga akan mempengaruhi keputusan pemerintah atau sebagai imbalan atas suatu keputusan yang telah diambilnya.
- Presiden meminta persetujuan DPR dalam hal mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI dan Kepala Kepolisian RI paling lambat 14 hari sebelum pengangkatan dan pemberhentiannya.
- Presiden sebagai kepala pemerintahan berwenang melaksanakan seluruh bidang pemerintahan kecuali yang telah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- Dalam hal Presiden mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri, Presiden diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban di depan Sidang MPR sebagai laporan akhir masa jabatan.
- Presiden hadir dan menjawab secara langsung pernyataan DPR berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki DPR, baik secara kelembagaan maupun perseorangan.

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9✓ 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hari /Bulan/ Tahun : RABU / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 21 / 6-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Judul ~~Artikel~~/ Berita : POSISI Gubernur Dalam Era Otonomi
SUBJEK / NO. KLASS : PEMERINTAHAN DAERAH / 352.

Posisi Gubernur dalam Era Otonomi

MENYAMBUT hari jadi ke-37, Jumat 27 April 2001 lalu, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih dalam suasana agak *nervous* menghadapi masa transisi sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Seperti daerah lain, daerah berpenduduk 1,8 juta jiwa ini juga tak luput dari terpaan berbagai masalah kontroversi ketika harus memasuki era baru tersebut.

*Bagi pegawai Pemda Sul*tra, hari jadi tahun ini ditandai dengan pemberlakuan ketentuan lima hari kerja dalam seminggu. Ketentuan tersebut diatur dalam suatu surat keputusan Gubernur Sultra, yang dilaksanakan mulai Senin 23 April 2001.

Sejalan dengan ketentuan lima hari kerja itu ditetapkan pula keseragaman pakaian dinas. Pada hari Senin pegawai diwajibkan memakai seragam linmas (perlindungan masyarakat, sebelumnya hansip), lalu seragam khas pamongpraja yakni warna kaki pada hari Selasa. Khusus bagi pejabat eselon III hingga eselon I, termasuk gubernur, pada hari Rabu dan Kamis menggunakan pakaian sipil lengkap.

Masyarakat atau pejabat yang akan bertemu gubernur pada hari itu disarankan untuk berpakaian sipil lengkap.

◆◆◆

PAKAIAN boleh rapi dan mentereng, tetapi wibawa lembaga gubernur di era otonomi ini berbicara lain. Seperti dikatakan Kaimoeddin, beberapa bupati di Sultra mulai melecehkan gubernur. Lembaga gubernur dipandang bukan lagi atasan bupati. Karena itu dalam menentukan suatu kebijakan, bupati tersebut merasa tidak perlu berkonsultasi atau melakukan koordinasi dengan gubernur.

Otonomi daerah cenderung diartikan secara ekstrem, yaitu kedaulatan bagi kabupaten untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Berdasarkan pemahaman yang *kebablasan* itu, maka pandangan sempit primordialisme dianggap wajar dan sah-sah saja jika mewarnai suatu kebijakan yang diambil kepala daerah kabupaten/kota.

Dalam pengisian jabatan struktural, misalnya, Kabupaten Kendari dan Kolaka menolak pegawai dari luar, termasuk dari provinsi. Tidak heran jika di dua kabupaten itu banyak pejabat eselon II tidak memenuhi syarat secara kepangkatan. Pangkat mereka lebih rendah setingkat dari syarat minimal yang harus dipenuhi.

Pemahaman yang berlebihan terhadap otonomi daerah juga menimbulkan sikap arogansi kepala daerah yang akibatnya merugikan rakyat banyak. Contohnya, adalah penolakan proyek-proyek sektoral yang ditangani provinsi sebagai lembaga dekonsentrasi.

Penolakan itu merupakan protes terhadap penanganan proyek-proyek sektoral oleh provinsi. Sebab hal itu dianggap menyimpang dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menjadi landasan otonomi daerah. Menurut jalan pikiran kepala daerah tersebut, proyek-proyek dari pemerintah pusat itu seharusnya dilaksanakan kabupaten. Dengan demikian, pemimpin proyek dan seluruh perangkatnya harus diangkat dan diberhentikan bupati, bukan oleh gubernur.

Padahal pengelolaan proyek-proyek pusat telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tatacara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Keputusan Menkeu ini merupakan penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Pembantuan.

Bila proyek-proyek sektoral itu tetap ditolak, maka rakyat banyak juga yang dirugikan oleh sikap arogansi seorang kepala daerah. "Proyek-proyek itu kita akan tempatkan di kabupaten lain yang mau menerimanya", ujar Gubernur Kaimoeddin seraya menambahkan, dalam tahun anggaran 2001 ini Sultra mendapat alokasi dana proyek-proyek sektoral hampir Rp 400 milyar. Jumlah ini jauh lebih besar dari dana APBD Sultra tahun 2001 yang hanya Rp 145 milyar lebih.

◆◆◆

KENDATI wibawa gubernur cenderung merosot di mata sebagian kepala daerah, menjelang hari jadi Provinsi Sultra ke-37 Gubernur Kaimoeddin malah lebih sering melakukan kunjungan kerja ke pelosok-pelosok kabupaten. Ia bertatap muka dengan tokoh masyarakat, aparat di jajaran pemda kabupaten, termasuk bupati atau Sekda setempat.

Kaimoeddin menggunakan forum itu untuk menjelaskan posisi Gubernur dan Kepala Daerah kabupaten/kota di era otonomi daerah. Gubernur, katanya, adalah pejabat dekonsentrasi yakni wakil pemerintah pusat di daerah. Sedangkan kepala daerah kabupaten/kota bukan pejabat dekonsentrasi. Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur memiliki kewenangan di bidang pengawasan dan pembinaan terhadap jalannya pemerintahan umum di daerah.

Tanpa pelaksanaan fungsi pejabat dekonsentrasi, bukan tidak mungkin simbol-simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia berangsur lenyap akibat pemahaman otonomi yang berlebihan. **(yas)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUM'AT / 18 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 13 / 3-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek : APBN / 351.72
/ NO. KLASS

Revisi APBN Jangan Abaikan Keadilan Sosial

Jakarta, Kompas

Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) HS Dillon mengingatkan agar keinginan untuk menutup defisit APBN tahun 2001 dengan mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM), subsidi listrik, dan meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak mengabaikan keadilan. "Kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan PPN harus mengarah pada pandangan yang adil. Jangan mengulangi kesalahan lama," katanya.

Dillon memastikan, dengan kebijakan menaikkan PPN, harga BBM, dan tarif dasar listrik (TDL), dampak langsung maupun tidak langsungnya akan membuat jumlah rakyat miskin Indonesia semakin besar jika tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin.

"Di awal krisis rakyat miskin kita sekitar 50 juta jiwa, saya perkirakan akan menjadi dua kali lipatnya. Sebab, mereka yang sekarang berada tepat di atas garis kemiskinan akan menjadi miskin bila inflasi membengkak dan daya belinya semakin turun," tuturnya.

Dillon menyatakan setuju bila subsidi pada sasaran yang tidak tepat harus dikurangi. Namun, harus dipertimbangkan bahwa kenaikan harga BBM dan TDL secara tidak langsung akan menjadi beban masyarakat miskin. "Dampak langsung pada rakyat miskin memang tidak besar, tetapi dengan kenaikan-kenaikan itu akan mendorong inflasi, dan rakyat miskin yang akan terpukul," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah hendaknya tidak hanya berpikir bahwa dana dari pengurangan sul[illegible] semata-mata untuk merev[illegible] APBN tahun 2001 yang defisit. "Tetapi, alihkan untuk subsidi yang tepat sasaran, yaitu untuk menanggulangi kemiskinan. Rizal Ramli (Menko Perekonomian—**Red**) dan Menteri Keuangan tidak boleh hanya berpikir untuk mengamankan APBN, mengabaikan faktor keadilan dan penanggulangan kemiskinan," sarannya.

Dillon melihat, dalam menetapkan APBN tampaknya kebijakan pemerintah justru kontra pada rakyat miskin. "Kalau mau pemerintah dapat menetapkan kebijakan pajak yang progresif, yaitu dengan menaikkan pajak properti. Itu pasti yang terkena bukan rakyat miskin. Tetapi, kalau PPN, secara tidak langsung rakyat miskin pun akan terkena dampaknya," tegasnya.

Jangan skema lama

Untuk itu, Dillon mengimbau agar pemerintah mengalokasikan subsidi yang tepat sasaran untuk menanggulangi kemiskinan. Antara lain dengan menurunkan harga beras operasi pasar khusus (OPK) atau memperluas penyebarannya, meningkatkan dana untuk subsidi pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin tidak hanya di tingkat puskesmas, subsidi pendidikan, serta pembangunan infrastruktur sederhana di kecamatan dan daerah terpencil.

"Jangan menggunakan lagi tiga skema penyaluran subsidi BBM seperti tahun lalu yang sampai kini tidak jelas pertanggungjawabannya," kata Dillon. Dana sisa subsidi BBM tahun 2000 sebesar Rp 800 milyar disalurkan melalui tiga skema, yaitu transfer tunai (*cash transfer*) kepada masyarakat yang dikelola oleh Depdagri, disalurkan sebagai dana bergulir bagi usaha kecil dan menengah, dan pembangunan sarana dan prasarana di pedesaan.

"BKPK seharusnya diberi kewenangan untuk menentukan ke mana dana tersebut dimanfaatkan dan sekaligus melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya, atau setidaknya diberi tanggung jawab koordinasi," ujarnya.

Pelayanan masyarakat

Pendapat senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Tosari Wijaya. Dikatakan, pemerintah memang menghadapi pilihan yang sulit. Di satu sisi harus menyelamatkan anggaran, sementara di sisi lain harus tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. "Sebab, keduanya bila tidak ditanggulangi dengan baik berdampak pada stabilitas sosial dan politik," ujarnya.

Oleh karena itu, pengurangan subsidi BBM dan listrik harus dikompensasikan ke dalam peningkatan pelayanan masyarakat. "Bentuk kompensasi itu yang harus segera dirumuskan. Konsepnya harus siap saat kenaikan BBM dan TDL dilaksanakan. Saya ingatkan, pengalaman penyaluran subsidi BBM yang gagal jangan diulangi lagi," tegasnya.

Tosari menyarankan, kompensasi yang diberikan sewajarnya diarahkan bagi subsidi kesehatan, pendidikan, dan prasaranan, "Sehingga revisi APBN tidak kehilangan konteks sosialnya."

Menurut Tosari, kenaikan BBM sebenarnya telah tertuang dalam Undang-Undang APBN tahun 2001 yang telah disahkan. Namun, karena pertimbangan stabilitas sosial dan politik, pemerintah memutuskan pelaksanaannya pada bulan April 2001 hanya untuk konsumsi industri. **(ely)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 28 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 1 / 3-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : SADLI, M
Subjek | NO. KLASS : APBN / 351.72

Revisi APBN 2001 dan Terobosan Megawati

PROSEDUR persetujuan paket penyesuaian APBN 2001 oleh DPR akan ditempatkan pada jalur cepat (*fast track*). Ini memungkinkan persetujuan DPR diberikan dalam dua minggu. Bahkan, namanya diganti, dari "revisi" menjadi "penyesuaian". Kalau memakai istilah "revisi", maka harus menunggu tahun anggaran lewat setengah waktu, artinya sesudah Juni 2001.

Tidak tetapi, konsekuensi perubahan angka-angka bukan perkara kecil. Harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dinaikkan 30 persen bisa menggiring para demonstran berjubel-jubel ke DPR dan Kantor Wakil Presiden (Wapres). Pajak Penjualan (PPn) yang baru akan menaikkan banyak harga barang. Kenaikan harga BBM, tarif listrik, dan banyak barang yang kena PPn pasti akan meniup inflasi ke atas 10 persen.

Pemerintah sendiri akan mengadakan penghematan besar. Pengeluaran rutin dikurangi, untuk belanja pegawai Rp 2 trilyun, pengeluaran dana perimbangan otonomi daerah dikurangi dengan Rp 5,4 trilyun, pengurangan subsidi BBM Rp 6,1 trilyun, subsidi listrik Rp 2,9 trilyun, dan pengeluaran rutin lainnya Rp 3 trilyun.

Pengeluaran pembangunan dikurangi Rp 1,8 trilyun, angka nominal sebetulnya harus membesar karena kurs rupiah menaikkan penerimaan bantuan proyek. Beberapa daerah tidak akan menerima haknya, dalam rangka otonomi daerah, dalam bentuk tunai, melainkan berupa kertas berharga.

Semua ini untuk menutup kekurangan pembiayaan sebesar Rp 34,4 trilyun. Besar defisit, sekitar Rp 53 trilyun atau 3,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), harus dipertahankan. Ini bukan tuntutan yang keji dari Dana Moneter Internasional.

IMF hanya mengatakan, "Jangan harapkan tambahan sumber dana luar negeri untuk menutup kekurangan pembiayaan itu." Bahkan, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia sing-masing akan mengurangi bantuannya sejumlah 400 juta dollar AS.

Banyak kalangan memandang asumsi makro-ekonomi APBN yang disesuaikan ini terlalu optimis, misalnya tingkat inflasi 9,3 persen (artinya masih *single digit*), kurs rupiah Rp 9.800 per dollar AS, dan lainnya.

Namun, sadarilah pembatasan politis-psikologis pemerintah. Kalau pemerintah mematok angka 12 persen untuk inflasi dan kurs rupiah Rp 11.000, maka sepertinya pemerintah mau memberi tanda *go ahead* yang bisa memecut pasar.

Maka, yang terpenting dari revisi/penyesuaian APBN ini adalah kebijakan (*policy*) yang sangat berani bagi pemerintah yang lemah dan seolah-olah menantang maut, bukan pada tepatnya angka-angka (yang berubah kalau kurs nyatanya bukan Rp 9.800).

Apakah ada alternatif yang lebih lunak?

Dulu, zaman Orde Baru, kalau defisit anggaran belanja pemerintah membengkak, Bank Indonesia disuruh mencetak uang. Akibatnya, inflasi bisa tinggi sekali. Sekarang tidak bisa lagi. Ikat pinggang pemerintah dan masyarakat harus sangat diketatkan.

Akan tetapi, tingkat inflasi tahun 2001 mudah-mudahan tidak akan menyentuh 15 persen. Inflasi *double digit* tidak bisa dielakkan setelah kurs rupiah melemah banyak.

Selama Gus Dur (Abdurrahman Wahid—**Red**) menjadi Presiden RI pada Oktober 1999, kurs rupiah jatuh dari Rp 7.000 menjadi Rp 11.000 per dollar AS. Semua harga impor cepat atau lambat akan naik 65 persen. Maka, mustahil mau membendung inflasi selama dua tahun ini di bawah 10 persen setahun.

Pada tahun 2001, pasti akan ada "inflasi susulan" atau "inflasi penyesuaian". Kinerja Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi sampai sekarang tidak gemilang, tetapi juga tidak jelek, *not bad*, mengingat situasi dan kondisi.

Bahkan, ada risiko, kalau kebijakan moneter dan fiskal tahun 2001 sangat ketat, dan cenderung terlalu ketat, hasilnya memang inflasi terkendali walaupun masih *double digit*, timbul gejala *stagflation*, artinya, inflasi relatif tinggi dibarengi kemunduran laju pertumbuhan.

Ada pihak yang memandang hasil demikian sebagai "biaya sosial" (*social cost*) untuk menyelamatkan kepentingan jangka menengah. Karena sekali inflasi *out-of-hand*, nanti susah sekali dikendalikan lagi setelah kepercayaan kepada mata uang hilang.

Pelipur hati bagi sisa tahun 2001 masih ada setelah revisi APBN diterima DPR dan dilaksanakan. Kalau umum bersedia mendukung dan memberikan kesempatan kepada Wapres Megawati Soekarnoputri untuk menunjukkan *leadership* (kepemimpinan)-nya, maka tidak ada kegaduhan protes kenaikan-kenaikan harga.

IMF menerima dengan baik terobosan Megawati ini dan bersedia mengucurkan dana, dan Paris Club juga London Club bersedia membantu meringankan *cash flow* (arus kas) pemerintah.

Karena pemerintah yang mengelola ekonomi (dan keamanan), di bawah kepemimpinan efektif Megawati lebih dipercaya, investasi asing dan modal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang diparkir di luar negeri mulai masuk kembali.

Kepercayaan pasar menguatkan kurs rupiah. Ini dengan sendirinya akan menurunkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Lingkaran setan yang jahat (*vicious circle*) berbalik menjadi *virtuous circle* (perputaran yang membawa untung).

Harus dihargai sikap DPR yang secara dini menyatakan bersedia menempatkan paket penyesuaian APBN 2001 pada jalur cepat. Ini sangat luar biasa karena mayoritas DPR sedang berseteru dengan pemerintah, khususnya Presiden Abdurrahman Wahid.

Kita patut angkat topi dan menghargai arifnya sikap politik DPR, yang bersedia mendukung suatu paket kebijakan fiskal yang bakal sangat memberatkan kehidupan sebagian masyarakat. Yang didukung lebih banyak Megawati-nya ketimbang paketnya, tetapi perbedaan ini tidak relevan.

Megawati telah mengambil sikap yang berani pada hari Kamis (17/5), sepuluh hari yang lalu, ketika merestui paket revisi yang diajukan oleh Menteri Keuangan.

Anehnya, dalam rapat kabinet yang dia pimpin itu, dua ekonom senior hadir, yakni Prof Widjojo Nitisastro dan Prof Emil Salim. Mereka juga diminta bicara. Sebelum hari itu, Frans Seda telah membawa kedua ekonom kawakan ini kepada Wapres untuk berkonsultasi, apakah kemacetan hubungan dengan IMF bisa dicairkan?

Widjojo, Emil, dan Frans lalu pergi ke IMF Jakarta dan dari situ menghubungi IMF Washington DC. Tanggapan Washington DC positif. IMF bersedia bersikap fleksibel asal paket revisi APBN kredibel. Contoh fleksibilitas ini adalah IMF bersedia mengirim tim ke Jakarta tanpa menunggu persetujuan DPR terhadap paket APBN yang baru.

IMF mungkin bisa ikut berinteraksi di Jakarta dan meli-

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

cinkan proses di DPR. Mark Baird dari Kantor Bank Dunia Jakarta beberapa hari yang lalu sudah melemparkan pujiannya. Maka, walaupun Wapres Megawati akan menghadapi situasi yang sangat sulit bulan Juni ini, dia, paling tidak, mendapat dukungan dari DPR dan dunia internasional.

Widjojo dan Emil Salim ingat kembali pengalamannya di tahun 1966/1967 ketika membantu Jenderal Soeharto melaksanakan paket kebijakan ekonomi baru.

Mereka sekarang prihatin mengenai daya tindak lanjut bagi inisiatif Wapres ini. Informasi serta sosialisasi mengenai kebijakan baru ini masih sangat minim.

Belum semua menteri menyadari konsekuensi-konsekuensi dari paket kebijaan baru itu. Kalau harga BBM dinaikkan, misalnya, bagaimana, berapa, kapan, dan bagaimana perlindungan golongan rakyat yang miskin?

Kalau harga BBM dan tarif listrik dinaikkan, maka menteri-menteri lain, seperti Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Energi, Menteri Dalam Negeri, bahkan kepala daerah, harus bicara dengan satu bahasa. Segala tindakan *follow-up* harus direncanakan dan disiapkan di setiap departemen.

Kantor Menteri Koordinator Perekonomian tidak bisa diharapkan lagi menjadi pos komando. Kepercayaan Wapres juga tampak sudah bergeser dari Menko Perekonomian ke Menteri Keuangan, yang telah ditunjuknya mewakili pemerintah di DPR pada pembicaraan paket penyesuaian APBN.

Menko Perekonomian juga punya stigma kurang cocok dengan IMF. Jumat lalu, dia masih menuduh IMF mem-*black mail* pemerintah. Dia pendekar Gus Dur, menggunakan amandemen Undang-Undang BI untuk menggganti Gubernur BI.

Rizal Ramli juga belum seluruhnya mau melepaskan gagasannya untuk mengijonkan (*securitization*) penerimaan kontrak gas Natuna ke Singapura walaupun gagasan ini ditentang Pemerintah Jepang dan negara-negara anggota Paris Club. Maka, masalah *securitization* ini menjadi batu sandungan bagi IMF juga.

Maka, pos komando untuk menggerakkan seluruh aparat pemerintahan melaksanakan paket revisi APBN harus ada di Kantor Wapres, yang mungkin pada waktu ini belum ada kemampuannya.

Apakah Emil Salim bisa menularkan pengalamannya di tahun 1966/1967 kepada staf Wapres?

Akhirnya, apakah pelaksanaan revisi APBN 2001 tidak akan terjebak dalam konflik antara Presiden dan DPR?

Komplikasi ini selalu ada.

Akan tetapi, kalau ekonomi sampai *collapse* di bulan Juni atau Juli, maka ini tidak menguntungkan Gus Dur, dan merugikan jagonya mayoritas DPR, yakni Megawati Soekarnoputri.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 21 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 1 / 3-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : INDRAWATI, Sri Mulyani
Subjek : APBN / 351.72
1 NO KLAS

Tantangan Implementasi Revisi APBN 2001

SIDANG Kabinet bidang ekonomi yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Megawati Soekarnoputri menghasilkan keputusan luar biasa penting, yaitu revisi APBN 2001. Keputusan yang telah tertunda lebih dari dua minggu ini merupakan produk kebijakan yang akan sangat menentukan pengelolaan ekonomi dan keberlanjutan pemulihan ekonomi. Pembahasan revisi APBN 2001 pada intinya menunjuk pada kondisi makroekonomi yang cenderung memburuk; nilai tukar, inflasi, dan menyeret suku bunga.

Krisis ekonomi tahun 1997, disusul berbagai upaya kebijakan pemulihan ekonomi pemerintah, menyebabkan beban APBN dalam bentuk utang publik yang mencapai lebih dari 110 persen dari Produk Domestik Produk (PDB) menjadi sangat besar. Beban utang publik ini kurang lebih separuh adalah utang dalam negeri (obligasi) sebanyak lebih dari Rp 650 trilyun untuk perbaikan sektor perbankan, dan utang luar negeri mencapai 75 milyar dollar AS (termasuk kepada Dana Moneter Internasional dan program Consultative Group on Indonesia untuk pendukung defisit APBN). Situasi inilah yang menyebabkan APBN kita sejak saat ini akan sangat rapuh (*vulnerable*) terhadap perubahan kondisi makroekonomi dan eksternal.

Oleh karena itu, tugas yang sangat penting dari tim ekonomi pemerintah dalam menjaga pemulihan ekonomi adalah apakah pemerintah mampu mengelola budgetnya agar tetap berlanjut (*sustainable*) sehingga tidak menimbulkan risiko sistemik makro yang akan memicu krisis ekonomi kedua.

Tugas penting ini disebut sebagai keharusan pemerintah melakukan penyesuaian fiskal (*fiscal adjustment*), yang dari pengalaman banyak negara menunjukkan kegagalan ketimbang keberhasilan. Implisit dalam tugas tim ekonomi ini adalah bagaimana mengelola kebijakan makro (termasuk pernyataan-pernyataan para menteri) agar stabilitas makro terjaga dan secara terus-menerus mengupayakan tekanan dan tingkat risiko APBN agar menurun.

Ini berarti kerja sama yang bagus dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengelola kondisi makro yang stabil sangat esensial. Juga kekompakan dan persamaan visi dan tujuan serta prioritas kebijakan di antara anggota tim ekonomi sendiri menjadi prasyarat yang sangat penting.

Herannya, sejak hari pertama, pemerintah justru terus berkonfrontasi dengan BI, bahkan secara politik terus bermanuver mendongkel kepemimpinan BI melalui amandemen Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 yang seharusnya bisa dilakukan secara lebih konstruktif dengan penegakan hukum yang konsisten dan kredibel.

Revisi APBN yang diajukan pemerintah adalah upaya mengembalikan APBN 2001 yang mengalami pembengkakan defisit yang sebelumnya direncanakan hanya sebesar Rp 52,5 trilyun atau sebesar 3,7 persen dari PDB menjadi Rp 87,8 trilyun atau sebesar 6,2 persen dari PDB atau terjadi *fiscal gap* sebesar Rp 34,4 trilyun.

Langkah yang akan dilakukan pemerintah menurut hasil Sidang Kabinet tersebut mencakup peningkatan sisi penerimaan dan pengurangan sisi pengeluaran. Kenaikan sisi pendapatan yang paling penting berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan ditingkatkan 2,5 persen menjadi 12,5 persen yang diperkirakan akan menyumbangkan tambahan penerimaan sebesar Rp 6,5 trilyun.

Selain itu, juga kenaikan penerimaan bukan pajak dari kehutanan dan laba BUMN yang ditingkatkan Rp 1,5 trilyun serta peningkatan penerimaan cukai Rp 0,5 trilyun. Rencana ini jauh lebih realistis dan lebih mungkin dari sisi kemampuan administrasi perpajakan dan sangat jauh berbeda dengan pernyataan Menko Perekonomian sebelum ini yang menyatakan kenaikan pendapatan berasal dari pajak penghasilan yang ditargetkan sebesar Rp 10 trilyun-Rp 15 trilyun, yang rasanya tidak mungkin tercapai dalam tahun anggaran ini yang tersisa enam bulan.

Program paling penting dan paling sulit adalah pada sisi pengeluaran yang bertujuan mengurangi pengeluaran/belanja pemerintah hingga sebesar Rp 22,9 trilyun, suatu angka yang fantastis. Penghematan ini berasal dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 6,5 trilyun dan pengurangan subsidi non-BBM sebesar Rp 2,9 trilyun.

Jangan lupa, perhitungan ini sudah memasukkan asumsi bahwa pemerintah tetap melakukan pengurangan subsidi dalam rencana awal APBN 2001 hampir Rp 5 trilyun yang menuntut kenaikan harga BBM rata-rata sebesar 20 persen. Pengurangan dana perimbangan ke daerah sebesar Rp 5,1 trilyun, pengeluaran dana pembangunan dikurangi Rp 3,3 trilyun, pengeluaran belanja pegawai Rp 2 trilyun, pengeluaran rutin lain dikurangi sebesar Rp 3 trilyun.

Program pengurangan pengeluaran sebesar Rp 22,9 trilyun dan peningkatan penerimaan sebesar Rp 8,5 trilyun akan berhasil menutup *fiscal gap* sebesar Rp 31,4 trilyun. Artinya, masih ada perbedaan yang akan ditutup dengan pengeluaran obligasi pemerintah pusat sebesar Rp 2,9 trilyun untuk dibayarkan kepada pemda yang di[illegible] mengalami surplus berdasarkan pelaksanaan desentralisasi fiskal (UU No 25/1999).

◆◆◆

SECARA umum rencana keseluruhan pemerintah kali ini cukup realistis meskipun tidak berarti program penyesuaian fiskal ini akan mudah untuk dilaksanakan bahkan juga cukup berisiko. Tantangan paling sulit dalam pengurangan pengeluaran terdiri dari tiga bidang.

Pertama, bidang pengurangan subsidi yang mensyaratkan kenaikan BBM dan non-BBM (listrik) yang cukup besar diperkirakan di atas 30 persen. Secara susbtansi, kebijakan kenaikan secara menyeluruh BBM akan lebih baik dan menghindari kekonyolan perbedaan harga yang rawan terhadap penyalahgunaan dan korupsi di tingkat pelaksanaan. Keberhasilan kebijakan ini mengharuskan dukungan menyeluruh dari DPR, masyarakat, dan aparat keamanan (polisi dan militer) sehingga menghindari provokasi politis dan kerusuhan sosial.

Pihak DPR yang sebelum ini dalam pertemuan lintas fraksi di Hotel Indonesia membuat pernyataan bersama untuk mendahulukan keselamatan dan keberlangsungan pemulihan ekonomi berarti harus ikut membantu keberhasilan program ini. Apalagi keputusan ini dibuat dalam Sidang Kabinet yang dipimpin oleh Wapres Megawati yang sekaligus pimpinan PDI Perjuangan yaitu fraksi terbesar di DPR.

Masyarakat harus diberikan pengertian mengenai betapa strategis kebijakan ini, untuk menghindarkan kebocor[illegible] penyelundupan yang semakin tidak terkendali dan kesalahan alokasi subsidi pada kelompok kaya. Artinya, kebijak[illegible] naikan harga BBM justru untuk melakukan koreksi ketidakadilan dan penyalahgunaan subsidi sehingga desain dan pelaksanaan program kompensasi bagi kelompok miskin yang kredibel dan sosialisasi sangat penting.

Kedua, tantangan berasal dari pengurangan dana perim-

bangan dan penerbitan obligasi kepada pemerintah daerah yang keduanya menyangkut kepentingan pemerintah daerah dan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Pihak yang paling terkena adalah daerah yang relatif kaya sumber daya alam yang seharusnya akan menikmati transfer dana dari pusat yang sangat besar. Untuk sementara mereka hanya akan mendapatkan pembayaran dalam bentuk obligasi, tentunya akan mengubah wajah APBD dan perencanaan pembangunan daerah. Isu ini begitu sensitif yang harus dijelaskan secara mendalam dan komprehensif dan harus dilakukan oleh pemerintah pusat yang berwibawa dan mendapat dukungan mayoritas partai politik dan masyarakat terutama di daerah.

Ini bisa dilakukan bila koordinasi dan kerja sama birokrasi antardepartemen dan antarjenjang dan partai politik besar mendukung secara penuh dan ikut turun tangan memberikan pengertian pada semua daerah. Kenyataan bahwa suasana politik di pusat hari ini sangat bergejolak, bahkan sempat dinyatakan bahwa ada beberapa daerah (terutama yang kaya sumber daya alam) akan memerdekakan diri oleh Presiden Abdurrahman Wahid dalam rangka perseteruan politik akhir-akhir ini sunguh membuat makin rumit dan tidak kondusif pelaksanaan kebijakan ini.

Ketiga, penghematan pada anggaran rutin dan anggaran pembangunan mengharuskan pengurangan aktivitas dan penajaman prioritas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat. Di sini *sense of crisis* perlu ditunjukkan dan dituangkan dalam bentuk kegiatan sehari-hari terutama oleh pimpinan pemerintahan. Perjalanan pimpinan negara yang dicitrakan sebagai pemborosan harus dihapus, simbol dan contoh tindakan pengetatan ikat pinggang perlu ditunjukkan di semua departemen.

Tantangan pada sisi penerimaan negara juga tidak kalah sulitnya. Kenaikan penerimaan PPN relatif "mudah" meskipun berarti tambahan beban bagi masyarakat karena pajak ini bisa digeser bebannya oleh perusahaan kepada konsumen akhir, namun juga bisa memukul daya saing produk kita selain rawan terhadap masuknya (serbuan) barang selundupan **terutama dari kompetitor kita produk dari Cina).**

Program peningkatan sisi penerimaan juga mencakup perbaikan kinerja BUMN yang harus mampu menyumbang lebih banyak pada penerimaan negara. Selain yang tidak secara eksplisit muncul adalah bahwa program penjualan aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan privatisasi BUMN harus mencapai target seperti rencana awal, yaitu Rp 27,5 trilyun BPPN dan Rp 6,5 trilyun privatisasi BUMN.

Lagi-lagi kecenderungan demoralisasi di BPPN dan BUMN akibat semakin banyaknya intervensi politik dan berbagai titipan dan konflik tujuan yang makin berat membuat pencapaian target ini menjadi sulit.

Mengingat waktu pelaksanaan penyesuaian fiskal hanya tinggal enam bulan, rasanya tidak ada lagi waktu tersedia untuk bertengkar atau beretorika kosong. Akan sangat mengkhawatirkan bila tim ekonomi menteri justru lebih sibuk ikut bermanuver politik praktis sehingga menimbulkan kesangsian dalam merosotnya dukungan politik dan kepercayaan publik/pasar.

Dukungan DPR harus segera diperoleh, penyusunan rencana tindakan konkret di lapangan harus dilakukan serta dipimpin dan dimonitor secara efektif dan berwibawa. Selain itu, kesigapan dan kekompakan antarpemerintah dan bekerja sama dengan pihak lain terkait di tingkat implementasi harus dilakukan.

Selain mukjizat, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan perekonomian kita adalah bila pemerintah bekerja lebih baik dan lebih keras dan memenangkan dukungan politis dan publik secara konstruktif. Apakah artinya ini secara politis, silakan diterjemahkan sendiri. ◆

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : RABU / 23 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 4 / 5-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : SUDIBYO, Bambang
Subjek : ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
1 NO. KLASS 351.72

Realisasi APBN, Cermin Kinerja Kabinet

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah instrumen fiskal Pemerintah yang realisasinya tidak hanya mencerminkan kinerja Pemerintah di bidang keuangan, tetapi juga kinerja Pemerintah dalam mengelola ekonomi makro, memelihara persatuan nasional, memelihara keamanan, memelihara harmoni, kelenturan, dan kestabilan sosial, serta memelihara harmoni dan kestabilan politik. Kegunaan APBN yang lebih luas itu tidak disadari oleh banyak pihak, termasuk oleh para pengamat ekonomi yang perspektifnya cenderung steril dari wawasan non-ekonomi, dan Pemerintah yang cenderung memandang APBN sekadar sebagai instrumen fiskal belaka.

Keseluruhan isi APBN bisa dikategorikan ke dalam empat bagian pokok. Bagian pertama berisi rencana aliran kas Pemerintah, yang terdiri dari penerimaan kas Pemerintah dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan yang akan dibiayai oleh penerimaan kas itu. Defisit/surplus merupakan selisih antara penerimaan kas dan pengeluaran kas itu.

Bagian kedua merupakan rencana pembiayaan jika direncanakan akan ada defisit pada bagian pertama. Bagian ketiga terdiri dari target-target makro yang harus dicapai untuk mendukung realisasi bagian pertama dan kedua, seperti target pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto, inflasi, tingkat produksi minyak, tingkat bunga SBI, kurs rupiah, dan target kondisi *ceteris paribus*. Bagian keempat berisi asumsi-asumsi yang mendasari kalkulasi pada bagian pertama dan kedua, seperti asumsi tentang harga minyak di pasar dunia dan pertumbuhan ekonomi dunia.

Penyempitan persepsi tentang kegunaan APBN berawal dari tradisi digunakannya kata "asumsi" di dalam dokumen APBN untuk hal-hal yang sebetulnya merupakan target makro, termasuk target kondisi *ceteris paribus*. Pada tingkat mikro, seperti pada anggaran perusahaan, penggunaan istilah "asumsi" untuk hal-hal seperti tingkat inflasi, tingkat bunga, dan kurs rupiah adalah tepat sebab hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang amat berpengaruh pada realisasi anggaran tetapi berada di luar kemampuan perusahaan untuk mengendalikannya. Pada tingkat makro nasional, hal-hal itu semuanya merupakan faktor yang bisa dikendalikan Pemerintah, dan memang merupakan tugas Pemerintah untuk mengendalikannya, sehingga tidak tepat jika disebut asumsi.

Karena digunakannya kata asumsi itu maka DPR tidak pernah menagih target-target stabilisasi makro yang dijanjikan Pemerintah bersama Bank Indonesia.

Namun sayangnya, sampai saat ini Pemerintah hanya serius menangani gangguan internalnya saja. Begitu seriusnya, di bawah bimbingan IMF, Pemerintah selama tiga tahun terakhir ini menangani gangguan internal pasar itu, sehingga peluru pada instrumen fiskal sekarang ini sudah habis, bahkan sudah negatif besar, sementara peluru pada instrumen moneter hampir habis. Pada instrumen SBI, yang sekarang tingkat bunganya sudah mencapai langkah 16,16 persen, otoritas moneter tinggal hanya memiliki derajat kebebasan sebesar 0,84 persen sebelum tingkat bunga SBI itu menyentuh tingkat *spread* negatif bagi sebagian besar bank.

Pada instrumen operasi pasar, semua orang tahu bahwa cadangan devisa 28 milyar dollar AS, sudah termasuk *second line of defense* dari IMF, tidak akan mencukupi untuk memenuhi tingginya permintaan dollar jika berbagai utang luar negeri jatuh tempo. Padahal peluru-peluru moneter itu selama satu tahun terakhir ini lebih banyak dipakai untuk menangani gangguan-gangguan eksternal pasar, gangguan yang sebetulnya lebih tepat untuk ditembak dengan peluru polsoskam.

Struktur krisis

Struktur permasalahan krisis APBN 2001, dengan demikian bisa dikemukakan sebagai berikut:

1. Berawal dari tidak efektifnya manajemen polsoskam sehingga target-target kondisi *ceteris paribus* tidak tercapai.

2. Maka target-target stabilisasi ekonomi makro dengan menggunakan instrumen fiskal dan moneter juga sulit untuk merealisasikannya, sementara peluru pada instrumen fiskal sudah habis dan peluru pada instrumen moneter hampir habis, sehingga:

3. Target-target keuangan negara pun menjadi teramat sulit untuk merealisasikannya pula.

4. Bersamaan dengan berlangsungnya butir 1, 2, dan 3 itu, memburuknya hubungan antara Pemerintah dan IMF, CGI, serta Paris Club juga memberikan kontribusi besar bagi terjadinya krisis APBN.

Tentu saja argumentasi yang sebaliknya juga bisa dikemukakan, yaitu bahwa kegagalan stabilisasi ekonomilah yang menjadi biang dari kegagalan stabilisasi polsoskam, karena memang ada interaksi timbal balik antara ketidakstabilan polsoskam dan ketidakstabilan ekonomi. Namun, karena *magnitude* dari dampak permasalahan polsoskam terhadap ekonomi jauh lebih besar daripada sebaliknya, maka cukup *fair* untuk mengatakan bahwa faktor polsoskamlah yang lebih mendasar dan menentukan.

Oleh karena itu, yang diperlukan sekarang sebetulnya adalah bukan sekadar revisi APBN.

Krisis APBN tahun 2001 memberikan contoh dan pengalaman, betapa target-target makro itu merupakan elemen APBN yang amat penting, dan bahwa merealisasikan APBN tidak hanya merupakan tanggung jawab Menteri Keuangan saja, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Kabinet. Rencana aliran kas memang secara menyeluruh merupakan tanggung jawab Menteri Keuangan, tetapi secara parsial juga menjadi tanggung jawab para menteri terkait. Target-target penumbuhan dan stabilisasi ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto, tingkat inflasi, tingkat bunga SBI, dan kurs rupiah adalah tanggung jawab tim ekonomi bersama Bank Indonesia untuk merealisasikannya.

Target kondisi *ceteris paribus*, yang berarti bahwa faktor-faktor relevan lain tidak mengalami gejolak signifikan, merupakan tanggung jawab tim polsoskam kabinet untuk merealisasikannya. Sayangnya, target ini tidak pernah dinyatakan secara eksplisit di dalam APBN, sehingga tim polsoskam tidak menyadari bahwa ada keterkaitan langsung antara kinerja mereka dengan kinerja keuangan negara. Padahal didasarkan pada asumsi kondisi *ceteris paribus*.

Muatan substansial

Perpustakaan Unikom
hlm. 339

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

Untuk Indonesia kali ini, muatan yang paling substantif dari target kondisi *ceteris paribus* dalam APBN 2001 adalah bahwa Pemerintah berjanji untuk berkinerja baik dalam memberikan pelayanan publiknya yang paling mendasar sehingga: 1. Persatuan nasional tetap utuh dan terjaga dengan baik; 2. Keamanan tetap terpelihara baik; 3. Kohesi, kelenturan, dan harmoni sosial, baik vertikal maupun horizontal, tetap terpelihara dengan baik; 4. Keseimbangan dan harmoni politik, baik vertikal maupun horizontal, tetap terpelihara dengan baik; 5. Penyelenggaraan hukum memenuhi harapan masyarakat akan keadilan, dan 6. Bahwa batin kolektif masyarakat tidak secara berlebihan terbebani oleh berbagai kekhawatiran, kecemburuan, dan dendam politik, sosial, dan ekonomi.

Masalah ancaman tekor pembiayaan dalam APBN 2001 yang pada perkiraan penulis jumlahnya berkisar antara Rp 50 trilyun sampai Rp 89 trilyun, hanyalah simtom di permukaan saja dari masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya adalah tidak dicapainya target kondisi *ceteris paribus* di atas. Tidak satu pun dari enam target kondisi *ceteris paribus* di atas yang berhasil direalisasikan oleh Pemerintah, sehingga Indonesia menjadi lingkungan yang penuh ketidakpastian dan risiko untuk menjalankan aktivitas kemanusiaan apa pun, termasuk kegiatan ekonomi.

Dalam keadaan seperti itu prospek kegiatan usaha secara umum meredup sehingga target-target penerimaan APBN seperti target penerimaan pajak, target bagian laba BUMN, dan target penjualan aset BPPN dan BUMN terancam tidak bisa direalisasikan dengan baik oleh Pemerintah.

Kegagalan untuk mencapai target kondisi *ceteris paribus* itu lebih lanjut menyebabkan stabilisasi ekonomi makro oleh tim ekonomi kabinet bersama Bank Indonesia menjadi sulit. Akibatnya kurs rupiah, tingkat bunga SBI, dan tingkat inflasi gagal untuk dikendalikan, dan itu berdampak serius pada meningkatnya pengeluaran APBN seperti subsidi, bunga, dan cicilan pokok utang luar negeri, bunga obligasi rekapitalisasi, dan belanja rutin serta pembangunan.

Gangguan kestabilan ekonomi makro dapat dikategorisasikan ke dalam dua golongan, yaitu golongan pengganggu ekuilibrium pasar yang bersifat internal bagi sistem pasar dan golongan pengganggu ekuilibrium yang bersifat eksternal bagi sistem pasar itu. Instrumen fiskal dan moneter hanya akan efektif untuk menangani gangguan internal, sedangkan untuk gangguan eksternal kedua instrumen itu mandul. Gangguan eksternal, yang biasanya membebani psikologi pasar, yang kali ini kita rasakan sebagai merosotnya kepercayaan pasar, hanya bisa ditangani dengan menggunakan instrumen polsoskam.

Krisis ekonomi Indonesia dimulai ketika pada tahun 1997 pasar kehilangan kepercayaan akan sustainabilitas rezim penguasa pada waktu itu. Pasar pada waktu itu juga melihat bahwa prospek bagi pergantian kekuasaan yang damai serta prospek bagi munculnya pemerintah baru yang kuat dan mampu menguasai keadaan kecil sekali. Faktor ini sifatnya eksternal bagi pasar, dan sampai sekarang masih bekerja menekan kepercayaan pasar. Merosotnya kepercayaan pasar ini menyebabkan pelarian modal terus-menerus dari Indonesia, yang menimbulkan ketidakseimbangan internal pasar, yaitu ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan devisa, yang menyebabkan bergejolak dan melemahnya nilai rupiah yang terekspresi pada bergejolak dan merosotnya kurs rupiah dan meningkatnya inflasi, yang selanjutnya berdampak pada bergejolak dan merosotnya indeks harga pasar saham dan menaiknya tingkat bunga SBI. Keseimbangan pasar sampai saat ini masih amat rentan karena bekerjanya gangguan eksternal dan internal itu.

Menurut APBN hanyalah ibarat memberikan obat turun panas (*paracetamol*) kepada pasien penderita tifus. Di samping *paracetamol*, si pasien juga perlu diberi obat antibiotik yang cocok untuk mikroba tifus itu. Jika hanya diberi *paracetamol* saja, maka empat jam kemudian temperatur pasien juga akan naik lagi. Demikian juga halnya dengan APBN. Jika hanya revisi APBN yang dilakukan, maka pembengkakan defisit akan kembali terjadi lagi tiga atau empat bulan kemudian setelah revisi.

Revisi APBN sebaiknya disusun setelah (1) tim polsoskam selesai menyusun dan mulai mengimplementasikan program yang operasional dan efektif untuk stabilisasi, harmonisasi, dan normalisasi kehidupan polsoskam, dan (2) tim ekonomi dan Bank Indonesia selesai memformulasikan dan mulai mengimplementasikan kebijakan yang operasional dan efektif pula untuk stabilisasi ekonomi makro. Dua hal inilah sebetulnya yang menjadi inti permasalahan bangsa sekarang ini. Masalah keuangan negara hanyalah konsekuensi logis saja dari kegagalan menangani dua permasalahan inti itu.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari analisis APBN dari perspektif luas ini adalah:

1. APBN bukanlah sekadar instrumen fiskalnya Menteri Keuangan. Lebih dari itu, APBN adalah kontrak kinerja komprehensif Pemerintah dengan [redacted]. Melalui kontrak APBN, DPR mempunyai hak tagih terhadap Pemerintah tidak hanya atas kinerja keuangan negara, [redacted] juga kinerja stabilisasi ekonomi makro, kinerja pembangunan, kinerja pelaksanaan roda pemerintahan, dan kinerja stabilisasi polsoskam. Target untuk semua kinerja itu ada dalam APBN.

2. APBN adalah instrumen yang amat baik dan komprehensif bagi Pemerintah untuk mengoordinasikan menteri-menterinya. Oleh karena itu Presiden tidak boleh cuek terhadap APBN.

3. Realisasi APBN adalah cermin yang daya refleksinya amat jernih dan jujur bagi setiap menteri untuk berkaca tentang kinerjanya masing-masing.

4. Krisis APBN 2001 bukanlah sekadar krisis keuangan negara, melainkan lebih dari itu, bukti kuantitatif dari sebuah krisis pemerintahan.

Krisis mudah sekali membuat kita merasa tertekan, marah, panik, putus harapan, dan berperilaku fatalistis. Tetapi krisis justru hanya bisa diatasi kalau kita berperilaku yang sebaliknya, yaitu tetap tenang, [redacted] tidak pernah putus harapan, berpikir jernih, dan secara dingin serta arif mengambil langkah-langkah yang tepat. Tanpa melunakan untuk senantiasa bertobat dan berdoa, tentunya.

◆ **Bambang Sudibyo,** *staf pengajar FE UGM, mantan Menteri Keuangan.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 26 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 14 / 1-4
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ / .....
Penulis : .....
Subjek : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA /
I NO. KLASS 351.72

Penyesuaian APBN 2001 Diharapkan Selesai 15 Juni

Jakarta, Kompas

Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo mengatakan, pembahasan penyesuaian APBN 2001 dengan Panitia Anggaran DPR diharapkan bisa diselesaikan sebelum 15 Juni 2001. "Ada langkah-langkah bagus yang telah dilakukan. Kami tinggal menunggu undangan dari DPR untuk pembahasannya. Kami harapkan sebelum 15 Juni bisa selesai," kata Menkeu di sela-sela acara KTT G-15 bidang "private sector", di Jakarta, Jumat (25/5).

Pemerintah telah mengajukan surat pengantar kepada pimpinan DPR mengenai pembahasan penyesuaian APBN 2001. DPR pun menyepakati pembahasan penyesuaian APBN dilakukan lewat jalur singkat, langsung dibahas di Panitia Anggaran.

Di tempat yang sama, Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasution mengatakan, dirinya menyambut gembira diserahkan draf penyesuaian APBN 2001 untuk dibahas di DPR, karena masalah penyesuaian APBN sangat ditunggu-tunggu IMF dan lembaga internasional lain. "Saya harapkan penyesuaian APBN itu tidak terlalu lama disetujui DPR sehingga hubungan dengan lembaga internasional bisa dilanjutkan," kata Anwar.

Suku bunga

Mengenai keluhan sejumlah bank peserta rekapitalisasi akibat tingginya tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang mengakibatkan kerugian bagi bank-bank yang mendapat obligasi dengan bunga tetap (*fixed rate*), Menkeu mengatakan, masalah itu sedang dipikirkan secara hati-hati oleh Pemerintah.

"Kami sedang melakukan perhitungan karena diharapkan jalan keluarnya tidak akan merugikan bank yang sudah menikmati *variable rate* dan jangan menimbulkan tambahan biaya bagi negara," katanya.

Sejumlah pihak sudah mengusulkan beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi kerugian bank-bank yang mendapat obligasi dengan bunga tetap, seperti dengan menukar seluruh obligasi bunga tetap dengan obligasi yang berbunga *variable*, atau menukar seluruh obligasi bunga tetap dengan aset yang telah direstrukturisasi di BPPN.

Obligasi rekapitalisasi yang telah dikeluarkan pemerintah adalah sebesar Rp 435,38 trilyun dengan obligasi yang berbunga tetap senilai Rp 180,90 trilyun, dan yang variabel sebanyak Rp 219,48 trilyun; sementara yang berbunga *hedge* (lindung nilai) Rp 35 trilyun.

Ikhwal kebijakan suku bunga tinggi ini, Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin mengatakan, masih diperlukan sebagai reaksi dari terus melemahnya nilai tukar rupiah. Kata dia, saat ini tekanan terhadap rupiah sudah semakin lemah, dan diharapkan jika kemelut politik semakin mereda, nilai tukar rupiah bisa kembali menguat.

Ia menambahkan, menjelang Sidang Paripurna DPR mengenai jawaban Presiden atas memorandum kedua DPR pada 30 Mei mendatang, BI telah menyiapkan segala instrumennya untuk menghindari tekanan terhadap rupiah. "Jika situasi kemelut politik mereda, nilai tukar rupiah bisa menguat setelah tanggal 30 Mei," katanya.

Rupiah di pasar *spot* antarbank Jakarta ditutup melemah hanya lima poin pada kurs Rp 11.425/Rp 11.455 per dollar AS. Pelaku pasar berhati-hati menanti perkembangan situasi politik.

Deputi Gubernur BI Anwar Nasution mengatakan, setelah menguatnya suku bunga SBI sebesar satu basis poin, diharapkan suku bunga SBI dapat menguat lagi pada pekan-pekan mendatang.

"Kami harapkan kembali turun. Siapa sih yang tidak mau kalau SBI turun, karena itu kan rupiah bisa menguat. Sampai level berapa, ya, kita tunggu saja perkembangan politik dan isu lainnya," katanya.

Suku bunga SBI untuk jangka waktu satu bulan saat ini mencapai 16,30 persen. Angka itu lebih baik daripada minggu sebelumnya yang mencapai 16,31 persen.

Adanya perkembangan politik dalam negeri, antara lain dengan pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid bahwa dirinya siap melakukan kompromi politik, turut menjadi salah satu faktor yang menggairahkan pelaku pasar untuk mengambil posisi beli. Karena itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta (BEJ) naik ke posisi yang cukup signifikan sebanyak 9,445 poin (2,5 poin) pada posisi 390,124. Broker yang paling banyak membukukan volume transaksi adalah Danareksa Sekuritas sebesar Rp 79,4 milyar, disusul Credit Lyonnais Indonesia sebesar Rp 73,4 milyar, dan Merril Lynch Indonesia sebesar Rp 50,2 milyar.

(joe/boy/AFEC)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 21 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 13 / 1-4
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / NO KLASS : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA / 351.72

Sebelum Revisi, DPR Akan Evaluasi APBN

Jakarta, Kompas

Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo akan mengadakan pertemuan konsultasi lebih dulu pada hari Senin (21/5) ini di Gedung DPR, Jakarta. Pertemuan itu untuk membahas rencana revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2001, dan mengevaluasi penerimaan dan pengeluaran negara yang telah berjalan lima bulan ini.

Demikian dikemukakan Ketua Panitia Anggaran yang juga Ketua Komisi IX DPR, Benny Pasaribu. "Pertama kali pemerintah memang meminta pertemuan konsultasi dengan pimpinan Panitia Anggaran saja, namun kemudian kita perluas menjadi pertemuan konsultasi bersama dengan seluruh pimpinan dan anggota Panitia Anggaran DPR," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Pasaribu, akan dibahas lebih dulu evaluasi pelaksanaan anggaran selama Januari hingga Mei 2001 dan kendala-kendalanya. "Sejauh mana realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN selama Januari sampai Mei ini. Apa penyebab terjadinya pembengkakan defisit sampai sebesar Rp 30 trilyun-Rp 35 trilyun. Serta juga mengklarifikasi usulan revisi," ujarnya.

"Jadi, kita belum memasuki substansi pembahasan revisi APBN tahun 2001, yang menyangkut asumsi-asumsi dan besaran-besaran revisi APBN 2001 mendatang. Apakah itu perubahan penerimaan maupun perubahan pengeluaran, serta defisit," tambahnya.

Pasaribu juga ditanya apakah nantinya Panitia Anggaran juga membahas kemungkinan pemerintah mengajukan revisi APBN melalui pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan dan Tambahan APBN beserta Nota Keuangannya, atau cukup dengan melakukan penyesuaian (*adjustmen*) saja atas perubahan APBN tersebut. "Mungkin saja dalam pembahasan yang berkembang kemudian masuk ke masalah kemungkinan revisi APBN tahun 2001 dan kemungkinan hanya melakukan *adjustmen* terhadap asumsi dan besaran-besaran pokoknya," tambahnya.

Namun, keputusan itu ada pada rapat Badan Musyawarah (Bamus). Begitu juga mekanisme pembahasan revisi tersebut, melalui mekanime biasa ataukah mekanisme *shortcut* (jalan pintas). **(har)**

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hari /Bulan/ Tahun : JUM'AT / SEPTEMBER / 2001
Hlm/Kolom : 1 / 6-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Judul ~~Artikel~~/ Berita : RAPBN 2002 lebih Sehat
SUBJEK : MO CLASS : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
351.72

RAPBN 2002 Lebih Sehat

Jakarta, Kompas

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2002 yang akan disampaikan Presiden Megawati Soekarnoputri pada Sidang Paripurna DPR, Jumat (7/9) ini, merupakan kombinasi keseimbangan antara tujuan konsolidasi fiskal dan stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

RAPBN 2002 ini diharapkan semakin sehat, dapat dipertahankan kesinambungannya, dan lebih didasarkan pada kemampuan penyediaan sumber-sumber pembiayaan di dalam negeri. Pada RAPBN 2002 ini, anggaran pembangunan mengalami peningkatan secara moderat, dengan porsi terbesar dari anggaran pembangunan akan dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial, termasuk untuk sektor transportasi.

Demikian Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti kepada wartawan, usai sidang kabinet di Gedung Utama Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Kamis (6/9). Sidang kabinet dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri, serta dihadiri Wapres Hamzah Haz dan para menteri Kabinet Gotong Royong, dengan agenda utama pembahasan dan laporan terakhir RAPBN 2002.

Secara terpisah, Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Kwik Kian Gie mengatakan, Menkeu sudah melakukan lobi untuk mengurangi utang pemerintah. "Menkeu dalam sidang kabinet melaporkan telah melakukan lobi kiri-kanan dan hasilnya positif semua. Tapi saya sendiri tidak ikut dalam lobi itu," ujar Kwik.

"CGI (Consultative Group on Indonesia) positif, Paris Club III positif. Walaupun pengelompokan negara dalam Paris Club III berbeda, anggotanya sama dengan CGI, sebanyak 23 negara. Dengan demikian, rumah tangga negara atau APBN akan menjadi mulus dan aman," kata Kwik Kian Gie.

Pada kesempatan itu, baik Kwik maupun Menkeu Boediono yang mendampingi Dorodjatun tidak bersedia memberikan angka-angka kuantitaif dalam RAPBN 2002. Yang jelas, kata Dorodjatun, substansi dari RAPBN 2002 memberikan gambaran serta aturan main yang lebih rinci mengenai pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah.

"Kita ingin sekali memperhatikan masalah sosial yang berkaitan dengan kesempatan kerja, pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Dalam budget itu, juga tergambar tentang ancang-ancang untuk mengurangi beban pembayaran utang dalam negeri dan luar negeri. Dalam RAPBN 2002, sudah tampak bagaimana caranya kita akan menyelesaikan beban utang yang hebat ini," papar Dorodjatun.

Dalam kaitan itu, pemerintah bertekad untuk tetap bekerja sama dengan negara-negara sahabat dan lembaga multilateral di forum CGI, yang akan mengadakan sidang pada awal bulan November 2001.

Asumsi dasar

Mengenai asumsi dasar penyusunan APBN, seperti laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), laju inflasi, kurs yang dipakai, tingkat suku bunga, serta asumsi harga minyak dan volumenya, Dorodjatun mengatakan, angka tersebut merupakan angka rata-rata. "Asumsi yang akan kita gunakan merupakan angka rata-rata. Jadi asumsi itu jangan dibaca seolah-olah kita akan mematok di situ," ujar Dorodjatun.

Meski tidak memberikan angka kuantitatif, ketika menjawab pertanyaan wartawan, Menkeu mengatakan beberapa pos pengeluaran akan mengalami penurunan seperti subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM). Demikian pula penerimaan dalam negeri minyak dan gas (migas). Penurunan itu disebabkan berbagai hal, antara lain karena asumsi kurs yang lebih rendah dibandingkan asumsi kurs dalam APBN 2001.

"Kemudian mengenai produksi dan harga minyak, juga agak sedikit berbeda, sehingga mengakibatkan penerimaan dalam negeri dari migas jadi menurun. Sementara asumsi kurs dalam RAPBN 2002, sebelumnya telah disepakati dengan DPR, yakni dalam rentang Rp 8.000 sampai Rp 9.000 per dollar AS," tambahnya.

Menkeu menambahkan, RAPBN tahun 2002 ini dimaksudkan untuk mencari keseimbangan antara konsolidasi fiskal dan stimulus fiskal. "Ini adalah dua sisi yang bisa bertentangan kalau kita ingin konsolidasi yang benar. Itu semuanya harus kita ketatkan. Tapi kalau kita ingin stimulus, kita harus longgarkan. Jadi intinya mencari keseimbangan antara pengetatan dan pelonggaran, dalam batas-batas realita yang dihadapi atau yang diproyeksikan akan dihadapi pada tahun 2002," ujar Menkeu.

Sumber dana RAPBN

Untuk mengisi sisi penerimaan RAPBN 2002, jelas Menkeu, akan dilakukan langkah-langkah untuk mencari sumber pendanaan dari dunia internasional, yaitu berupa pinjaman luar negeri melalui sidang CGI, di samping mengusulkan pertemuan Paris Club untuk tahun 2002 dan selanjutnya.

"Pemerintah akan kembali memanfaatkan Paris Club. Kita akan mengupayakan untuk bertemu donor-donor untuk membicarakan kemungkinan Paris Club III. Namun jadwal pembicaraan Paris Club III belum ditentukan. Tapi yang penting bagi pemerintah, persetujuan anggota utama Paris Club. Ini masih dalam tahap awal, tetapi sudah kita berikan tempat dalam RAPBN 2002," tambahnya.

Sama seperti masa-masa sebelumnya, setelah pemerintah menyampaikan RAPBN, RAPBN 2002 ini selanjutnya akan dibahas pada rapat Panitia Anggaran, untuk kemudian dibawa dalam pembahasan di tingkat komisi di DPR.

Tahap berikutnya, RAPBN ini akan diteruskan ke Sidang Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Direncanakan, RAPBN 2002 sudah bisa disahkan menjadi UU pada awal bulan November 2001.

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Hari /Bulan/ Tahun : RABU / SEPTEMBER / 2001
Hlm/Kolom : 13 / 1 5 - 7
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : -
Judul ~~Artikel~~/ Berita : TARGET Defisit RAPBN 2002 sebesar 2,5 Persen
SUBJEK : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA / 351.72

Target Defisit RAPBN 2002 Sebesar 2,5 Persen

Jakarta, Kompas

Pemerintah diperkirakan akan mengusulkan defisit sebesar Rp 50 trilyun atau sekitar 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), untuk Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2002. Angka ini jauh lebih kecil dari defisit APBN tahun sebelumnya, yang ditetapkan bersama oleh pemerintah dan Panitia Anggaran sebesar 3,7 persen dari PDB.

Usulan angka defisit RAPBN 2002 tersebut memang sesuai dengan target Undang-undang Program Pembangunan Nasional, yang menetapkan besaran defisit sampai dengan tahun 2004 mencapai angka nol persen. Demikian diungkapkan oleh anggota Komisi IX DPR asal Fraksi PDI Perjuangan Sukowaluyo Mintorahardjo, Selasa (4/9).

Menurut mantan Ketua Komisi IX DPR itu, defisit RAPBN 2002 sebesar Rp 50 trilyun itu diperoleh dari volume RAPBN 2002 yang diperkirakan akan mencapai angka kisaran Rp 330 trilyun. Sedangkan penerimaan RAPBN 2002 diperkirakan mencapai sekitar Rp 280 trilyun. "Dengan defisit sebesar 2,5 persen tersebut, pemerintah mencoba APBN yang kredibel dan *sustainable*," tambahnya.

Sementara, menyangkut asumsi dasar dalam RAPBN 2002, pemerintah juga sudah melakukan perhitungan-perhitungan. Untuk tingkat inflasi diperkirakan 8-9 persen, tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8-5,0 persen.

Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dollar diperkirakan sebesar Rp 8.000 sampai Rp 8.600. Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka tiga bulan diperkirakan 13-14 persen. Sementara, harga minyak mentah dunia diperkirakan 22-23 dollar/barrel.

Sebelumnya, dalam rapat kerja menyangkut pembahasan Pokok-Pokok Pendahuluan RAPBN 2002, pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Rizal Ramli (waktu itu) bersama Panitia Anggaran DPR, Juli lalu, menetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen, tingkat inflasi 7,9 persen, kurs antara Rp 8.000-Rp 9.000/dollar, tingkat suku bunga SBI 14-16 persen, dan harga minyak 18-22 dollar/barrel.

Rangsangan

Dikatakan, dengan asumsi-asumsi dasar dalam RAPBN 2002 ini, pemerintah berharap dapat memberikan rangsangan untuk mendorong bergeraknya sektor riil, yang selanjutnya dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pembangunan proyek dan program bantuan akan digalakkan. "Pemerintah inginkan proyek itu dapat dilakukan secara merata," tambahnya.

Dengan perkiraan kurs antara Rp 8.000/dollar sampai Rp 8.600/dollar, pemerintah diharapkan juga dapat mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar, agar dapat menggerakkan sektor riil. "Begitu juga penting bagi pemerintah untuk menurunkan tingkat suku bunga SBI. Dengan tingginya tingkat suku bunga SBI, bank cenderung menggunakan dana masyarakat untuk membeli SBI daripada *lending* kredit," lanjutnya.

Ditambahkan, dengan tingkat suku bunga antara 13 persen sampai 14 persen pun, itu akan tetap membebani sebagian bank yang telah direkapitalisasi. Ini disebabkan, karena bunga obligasi rekapitalisasi yang *fixed rate* hanya sebesar 12,3 persen saja. **(har)**